

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Partisipasi sejajar perempuan dalam mengambil keputusan bukanlah semata-mata sebuah tuntutan akan keadilan demokrasi, namun juga dapat dilihat sebagai syarat penting agar kepentingan kaum perempuan dapat diperhitungkan.¹

Dalam sistem demokrasi rakyatlah yang memiliki daulat penuh. Publik yang menentukan siapa-siapa yang nantinya akan menjadi orang yang memerintah. Publik pula yang menentukan wakil-wakil mereka yang akan membawa aspirasi dan kepentingannya. Melalui publik pula kita memilih orang-orang untuk dipercaya merumuskan kesepakatan-kesepakatan sosial tentang aturan kehidupan, norma, hukum dan segala jenis perundingan lainnya. Kata kunci dalam sistem demokrasi adalah keturutsertaan (partisipasi) dan keterwakilan (representasi).

Salah satu yang terpenting dalam menuju proses pemerintahan yang demokratis adalah pembagian kekuasaan, antara satu tingkat pemerintahan ke tingkat yang lebih rendah, antara birokrasi pemerintahan dan warga, serta antara kelompok-kelompok warga sendiri. Distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan publik, merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih demokratis.

Demokrasi yang diandaikan sebagai partisipasi sejajar seluruh komponen warga negara hanya terwujud ketika dominasi dan subordinasi antara individu atau antar kelompok terhapus. Pada titik inilah, menyuarakan tuntutan keterwakilan politik perempuan seharusnya tidak dimaknai sebagai tindakan berlebihan yang hanya berpihak pada kepentingan perempuan semata. Tuntutan ini harus disadari sebagai bentuk hak asasi manusia, porsi keterwakilan politik perempuan juga merupakan tindakan strategis untuk mengurangi hambatan individu dalam berkiprah. Kuota merupakan instrumen yang efektif untuk dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik sekaligus meminimalkan ketidakadilan gender yang ada dalam praktik kehidupan masyarakat.²

Dapat kita lihat gerakan perempuan mulai abad XIX yang diawali perjuangan untuk mempunyai hak pencarian hidup di luar rumah dengan memberikan lapangan pekerjaan dan pendidikan bagi perempuan di Eropa saat revolusi industri. Kemudian pada pertengahan abad XX mulai tampak gerakan perempuan, terutama perempuan terpelajar yang berhasil meniti karir pada berbagai kehidupan, jenjang dan kepangkatan bahkan yang tertinggi sekalipun. Seperti keberhasilan Sirimavo Bandaranaike menjadi perdana menteri perempuan pertama di Srilanka, Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri India pada tahun 1966-1977, Golda Meier, Perdana Menteri Israel tahun 1969-1974, Isabel Peron menjadi Presiden Argentina tahun 1974-1976, Margareth Tacher menjadi Perdana

Menteri Inggris pada 1979.³ Corazon Aquino dan Gloria Macapagal Aroyo menjadi presiden Filipina, Benazir Butho di Pakistan, Begum Khaleda Zia di Bangladesh, dan Megawati Soekarno Putri pernah menjabat sebagai Presiden perempuan pertama bagi Indonesia.

Norwegia dan Indonesia adalah dua negara yang memiliki banyak perbedaan. Seperti tingkat demokrasi, tingkat pertumbuhan negara, tingkat ekonomi, dan lain-lain.

Peran politik perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting mengingat jumlah pemilih perempuan dalam pemilu yang cukup banyak. Pada pemilu 1999 pemilih perempuan di Indonesia berjumlah 57 persen dari total pemilih terdaftar.⁴ Hal tersebut merupakan potensi dan kekuatan besar yang perlu disadari perempuan, bahwa event politik yang penting seperti pemilu, keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh partisipasi politik perempuan. Menurut data statistik Norwegia tahun 2000, pada tahun 1990 jumlah perempuan di Norwegia sebesar 50,56% atau 2.148.836 jiwa dan laki-laki sebesar 49,44% atau 2.100.994 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Dari penjelasan di atas itu menjadikan penulis tertarik untuk membahas fenomena apa yang akan dihadapi oleh perempuan dalam parlemen di negara Norwegia dan Indonesia, dengan mengambil judul "KETERWAKILAN

³ Aida Vitalaya, dalam makalah seminar nasional, Wacana dan Gerakan Perempuan Kontemporer: Peta Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia, Antisipasi untuk Gerakan Muslim, PP Aisyah, Yogyakarta, 2000.

⁴ *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 6, No 1, Feb 2001, hal 52.

POLITIK PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI NORWEGIA DAN INDONESIA“ sebagai judul skripsi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis adalah untuk melakukan penelitian terhadap keterwakilan politik perempuan dalam parlemen Norwegia dan Indonesia adalah untuk:

1. Memberikan gambaran sejauh mana fenomena gerakan perempuan yang terjadi di Norwegia dan Indonesia memperjuangkan perempuan agar terlibat dalam parlemen.
2. Menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor yang membedakan tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen di Norwegia dan Indonesia, yang merupakan faktor penghambat bagi kaum perempuan di Indonesia.
3. Sebagai bentuk implementasi penulis terhadap ilmu yang telah dipelajari penulis selama mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Sebagai upaya penulis untuk memenuhi persyaratan guna mendapat gelar kesarjanaan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Partisipasi sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik adalah salah satu prinsip mendasar yang diamanatkan di dalam Konvensi

the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1979 dan disahkan mulai tahun 1981. Sekarang, lebih dari 20 tahun sejak ditandatanganinya konvensi itu (yang juga telah diratifikasi oleh 165 negara), kenyataan menunjukkan bahwa kaum perempuan di seluruh pelosok dunia masih saja termarginalisasi dan kurang terwakili di dunia politik.

Pada tahun 1995, Platform Aksi Beijing mengidentifikasi adanya “kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan pada semua tingkat” dan “kurangnya mekanisme pada semua level dalam upaya memajukan perempuan”, yang merupakan dua wilayah penting dalam kerangka perjuangan memajukan kaum perempuan. Dalam tahun 2002, kendati sudah ada prestasi yang signifikan di bidang hukum baik di level internasional maupun nasional, ditunjang pula oleh berbagai aktivitas dan mobilisasi selama bertahun-tahun, partisipasi perempuan di panggung politik sebagai mitra sejajar laki-laki belum juga menuai keberhasilan.⁵

Di masa kini, langkah mengaitkan demokrasi dengan kesejajaran gender merupakan prinsip yang sudah diterima secara luas. Salah satu credo penting dari tiap kerangka kerja demokrasi adalah prinsip hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak politik yang tidak bagi laki-laki dan perempuan. Pengembangan setiap agenda politik yang tidak termasuk unsur perspektif, pandangan dan pengalaman dari pihak-pihak yang akan terkena dampak agenda

dirintis selama sekian abad oleh tokoh-tokoh perempuan terkemuka – dan beberapa laki-laki pula – pengakuan dan pelaksanaan hak-hak politik dan sosial-ekonomi antara laki-laki dan perempuan masih belum seimbang.⁶ Kaum perempuan adalah separuh populasi dunia, 50 persen dari total tenaga kerja, namun mereka juga adalah sekitar satu milyar manusia yang hidup dalam belunggu kemiskinan. Pengambilan keputusan dan penyusunan prioritas tetap saja berada di tangan kaum laki-laki.

Perempuan ingin ikut membentuk keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka beserta keluarganya, takdir politik dan ekonomi komunitas dan negara mereka, serta struktur dari hubungan internasional yang ada. Partisipasi politik dan perwakilan adalah elemen-elemen penting bagi tercapainya tujuan-tujuan tersebut.⁷

Di seluruh dunia, kaum perempuan hanya menempati 16.0 persen dari total anggota parlemen yang ada. Rata-rata persentase global kaum perempuan yang menjadi anggota parlemen di setiap wilayah regional kurang lebih sama saja, kecuali untuk negara-negara di kawasan Nordik yang mana kaum perempuannya rata-rata mencapai tingkat keterwakilan 40 persen di lembaga-lembaga legislatif. Di ujung jauh dari spektrum tersebut adalah negara-negara Arab di mana perempuannya hanya menempati porsi 8.2 persen dari total anggota dewan legislatifnya.⁸ Kawasan Asia Tenggara pun tidak berbeda jauh dari kecenderungan global ini. Dengan tingkat perwakilan perempuan yang rata-rata hanya 12,7 persen di majelis rendah, kawasan Asia Tenggara menunjukkan fakta bahwa

⁶ <http://www.ipu.org>.

⁷ *Loc Cit.*

penyertaan dan partisipasi penuh kaum perempuan dalam kehidupan publik merupakan salah satu tantangan dan perkembangan terbesarnya dalam kehidupan berdemokrasi.

Dalam konteks ini, nampak bahwa tugas yang membentang kedepan masih sangat banyak: tindakan tegas dari pemerintah, komitmen partai-partai politik, dan transformasi sosial untuk mengubah persepsi keliru (tentang perempuan) yang selama ini telah mendominasi konsepsi kita tentang hubungan kemasyarakatan. Perlu juga ditinggalkan pola-pola tradisional dan pemahaman mengenai peranan dan posisi perempuan di dalam politik juga perlu dihargai dengan mengubah persepsi tentang kekuasaan dan dengan menggugurkan persepsi usang bahwa kehidupan publik (politik) merupakan wilayah dominasi laki-laki. Tantangan terberat untuk kawasan Asia adalah bagaimana cara meningkatkan konsolidasi demokrasi yang sekaligus mendukung partisipasi dan mobilisasi perempuan dari berbagai dari berbagai latar belakang status dan asal usul.

Kawasan Eropa merupakan wilayah di mana sebagian besar negaranya dikenal sebagai negara-negara industri maju yang iklim politiknya cenderung lebih demokratis. Jumlah representasi perempuan di parlemen untuk kawasan Eropa Utara khususnya, sampai saat ini ternyata lebih tinggi di banding dengan kawasan lain yaitu 39.9 persen. Angka tersebut dapat tercapai setelah negara-negara tersebut mengadopsi sistem kuota gender pada sekitar tahun 1980-an, baik dalam bentuk konstitusi maupun partai. Pada tahun 2005 prosentase perempuan di

Jerman 32,8% dan Italia 11,5%. Namun prestasi tertinggi diraih oleh negara-negara Skandinavia termasuk Norwegia yang saat ini mencapai 38,2%, tapi itu bukanlah prestasi Norwegia yang gemilang, sebab pada tahun 1993 representasi perempuan di parlemen mencapai 39,8%.⁹

Keberhasilan mereka tidak terlepas dari perjuangan gerakan feminis yang muncul di Eropa pada tahun 1960-an yang secara konsisten mendesak bahkan menekan partai-partai politik agar menerapkan sistem kuota gender, tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dan jumlah perempuan yang mencapai jabatan politisi sehingga kepentingan perempuan dapat direpresentasikan dalam lembaga pembuatan kebijakan. Pada tahun 1970-an gerakan feminis berhasil mendesak penerapan sistem kuota gender pada partai sayap kiri dan partai kecil saja.

Partisipasi politik perempuan telah menjadi perdebatan panjang di Indonesia dan menjadi semakin hangat pada beberapa bulan terakhir. Masalah peningkatan partisipasi tidak hanya merupakan permasalahan partai politik, *civil society*, kalangan akademisi dan masyarakat secara umum. Pencantuman kuota dalam UU Pemilu dipandang sebagai sebuah kemajuan signifikan dalam perjuangan bertahun-tahun pergerakan perempuan Indonesia.¹⁰ Penerapan kuota memberikan antusiasme untuk membangun tujuan perjuangan perempuan ke depannya dan menjadi titik awal untuk memulai langkah memperjuangkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia politik.

⁹ Inter-Parliamentary Union, *Ibid.*

Norwegia dan Indonesia, merupakan dua negara yang memiliki latar belakang yang berbeda terhadap perjuangan hak-hak kesetaraan perempuan. Norwegia yang berada di Eropa, serta berada di kawasan Nordik beberapa langkah lebih maju dalam hal kesetaraan perempuan. Karena perjuangan perempuan yang ada di Eropa telah mengilhami pergerakan perempuan diseluruh kawasan yang ada di dunia untuk terus berjuang mendapatkan kesetaraan hak-hak dengan kaum laki-laki khususnya hak-hak kesetaraan dalam bidang politik.

Perbedaan dalam sistem pemilihan, proses rekrutmen partai politik, serta penerapan sistem kuota terhadap kandidat perempuan sangat mempengaruhi jumlah keterwakilan perempuan dalam semua lembaga politik. Yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi perempuan di suatu negara berbeda satu dengan yang lain, budaya patriarkhi yang sangat mengakar kuat dalam masyarakat telah menempatkan perempuan pada posisi kelas dua. Kondisi perekonomian negara yang buruk juga mempengaruhi, tingkat kesejahteraan perempuan suatu negara. Krisis ekonomi dibanyak negara membuat perempuan mengalami pemiskinan global, perempuan juga mengalami diskriminasi dalam pembagian kerja. Baik Norwegia maupun Indonesia, pekerja perempuan masih sangat sedikit yang bekerja di wilayah publik, kebanyakan perempuan hanya bekerja di wilayah domestik dengan pembagian upah yang tidak seimbang dengan pekerja laki-laki dengan jenis-jenis pekerjaan yang sama.

Walaupun Norwegia juga mendapati hambatan-hambatan dalam keterwakilan perempuan seperti yang ada di atas, namun perjuangan pergerakan

perempuan di Norwegia pada salah satu perolehan tertinggi pada klasifikasi tingkat keterwakilan perempuan di parlemen dunia.

Berbeda dengan Indonesia, perolehan keterwakilan perempuan masih sangat jauh jika dibandingkan dengan yang ada di Norwegia. Penerapan sistem kuota 30 persen baru digunakan pada pemilu 2004 yang lalu, masih menjadi pekerjaan rumah partai-partai politik karena banyaknya parpol yang kesulitan memperoleh kandidat perempuan yang mampu mewakili partainya untuk bersaing di setiap pemilihan. Hal tersebut menyebabkan kandidat perempuan hanya sebagai hiasan, atau syarat atas pemenuhan kuota dalam partai peserta pemilu. Karena banyaknya kandidat perempuan yang ditempatkan pada urutan “nomor sepatu” pada daftar calon legislatif partai yang mereka wakili.

Meskipun dijamin konstitusi, realitas kehidupan sosial menunjukkan kondisi yang berbeda dengan amanat konstitusi tersebut. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan telah dalam semua aspek kehidupan, tidak terkecuali bidang politik. Misalnya, minimnya jumlah keterwakilan perempuan dalam struktur kekuasaan negara. Padahal struktur kekuasaan ini sangat dominan dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

“Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat keterwakilan perempuan

E. Kerangka Dasar Teori

Dalam melihat permasalahan di atas terdapat kerangka pemikiran baik teori maupun konsep yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan yang muncul. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu diharapkan terjadi.¹¹ Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, atribut suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.¹²

Untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada penulis menggunakan konsep berikut:

1. Sistem Politik

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya), yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud.¹³

Sistem juga berarti sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.¹⁴

Sistem juga merupakan suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur.¹⁵

¹¹ Mohtar Mas' oed, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional*, Pusat Study UGM, Yogyakarta, hal 181.

¹² *Ibid*, hal 110.

¹³ Poerwadarminta, *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 955.

¹⁴ Sri Sumantri, *"Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara"*, Tarsito, Bandung, 1976, hal. 17.

Jadi sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang kait mengkait satu sama lain, bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia adalah salah satu contoh sistem, dan anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah, kemudian seterusnya sistem pemerintahan desa dan kelurahan.¹⁶

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik dan perilaku politik¹⁷

Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhi. Sistem politik merupakan

organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Sistem politik melaksanakan perang atau mendorong usaha perdamaian; memajukan perdagangan internasional atau membatasinya; membuka diri demi pertukaran gagasan-gagasan atau menutup diri; menarik pajak dari rakyat secara adil atau tidak; mengatur perilaku manusia dengan ketat atau kurang ketat; mengalokasikan sumber-daya untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan atau tidak; dan sebagainya.¹⁸

Untuk melakukan kegiatan ini sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau struktur politik, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik, yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu, yang melanjutkan sistem politik itu untuk merumuskan melaksanakan kebijakan-kebijakannya.

Sistem politik adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Sistem politik betapapun modern dan primitif sifatnya memiliki beberapa ciri yang terdapat padanya. Ciri atau karakter dari sistem politik yang dikemukakan oleh A. Almond intinya adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Semua sistem politik pasti mempunyai struktur politik. Dengan pengertian bahwa di dalam masyarakat yang paling sederhana pun, sistem politik dari masyarakat tersebut mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat yang paling kompleks. Tiap-tiap tipe struktur politik dapat

¹⁸ Mohtar Mas'ood & Colin MacAndrews, "Perbandingan Sistem Politik", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal. 23-24.

diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya menurut tingkat dan bentuk strukturnya.

- 2) Semua sistem politik, baik yang sudah modern maupun yang masih primitif, menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda-beda yang disebabkan oleh karena perbedaan struktur. Demikian pula dapat diperbandingkan bagaimanakah fungsi-fungsi dari sistem politik itu dijalankan dan bagaimana pula cara/gaya melaksanakannya.
- 3) Semua struktur politik, baik yang terdapat di dalam masyarakat yang sudah modern maupun yang terdapat di dalam masyarakat yang masih primitif, betapapun terspesialisasikan tetap mempunyai sifat multi fungsional (menjalankan beberapa/banyak fungsi). Sistem politik dapat di bandingkan menurut tingkat kekhususan fungsi di dalam struktur itu.
- 4) Semua sistem politik adalah merupakan sistem "campuran" apabila dipandang dari pengertian kebudayaan. Dalam pengertian yang rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya primitif. Perbedaan yang terdapat hanya bersifat relatif saja, dan keduanya hal-hal yang bersifat modern dan tradisional) bercampur satu dengan yang lainnya.

Sistem politik yang ada di suatu negara berbeda dengan yang dianut oleh negara lain. Begitu pula dengan sistem politik yang ada di Norwegia dan Indonesia. Norwegia merupakan negara monarkhi konstitusional dengan sistem pemerintahan demokratis parlemen. Bentuk pemerintahan demokratis dan monarkhi dimuat pada Konstitusi 1814, sementara bentuk parlemen diperkenalkan

menjadi simbol penting sebagai Kepala Negara dan wakil resmi masyarakat dan industri Norwegia. Dengan sistem pemerintahan monarkhi konstitusional maka Norwegia memiliki struktur politik, Storting (kekuatan legislatif), pemerintah (pelaksana) dan pengadilan (kuasa hukum), partai politik, serta kelompok kepentingan.

Sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial dan pemerintahannya diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang, setelah diselingi sebentar dengan demokrasi parlementer pada tahun 1950-an, kembali diberlakukan pada tahun 1959.

Setelah dikeluarkannya empat perubahan atas undang-undang dasar antara tahun 1999 sampai dengan 2002, terdapat lembaga legislatif dengan sistem bikameral yang terdiri dari 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang masing-masing dipilih oleh rakyat. Kedua lembaga tersebut secara bersama-sama menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersidang lima tahun sekali untuk melantik presiden dan wakil presiden.

Struktur politik yang ada di Indonesia terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, badan peradilan, partai politik dan kelompok kepentingan. Struktur

111 lembaga menentukan sistem

2. Budaya Politik

Budaya merupakan sebuah kata pungut dari bahasa Sanskerta; *buddhaya*, yang berdasarkan kepada kata *buddhi* yang kita kenal pula sebagai kata budi dalam bahasa Indonesia. Menurut Andreas Eppink, *culture* atau kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Budaya merupakan semua aspek ungkapan ekspresif insan manusia yang diwujudkan pada alam sekitarnya. Dalam hal ini bisa secara fisik maupun mental. Dengan demikian bahwa kata budaya dapat berarti: pikiran, akal budi, konsep, adat istiadat, segala sesuatu ungkapan manusia, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit diubah, seni, kultur, serta pakaian.²⁰

Sedangkan budaya politik adalah pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang. Budaya politik lebih mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap, sistem kepercayaan simbol yang dimiliki individu dan yang dilaksanakannya dalam masyarakat. Kegiatan politik seseorang misalnya, bukan saja ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, melainkan juga oleh harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik. Budaya politik antara lain dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem politik, agama, etnik, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan.²¹

²⁰ <http://id.wikipedia.org>

Table 1

Tingkat Abstraksi Konsep Budaya Politik

Konsep	Variabel	Indikator
Budaya Politik	Budaya Patriarkhi	1. % tingkat pendidikan perempuan 2. % perempuan di sektor domestik 3. % perempuan di sektor publik 4. % perempuan ikut pemilu 5. % perempuan jadi nominasi kandidat parpol 6. % keterwakilan perempuan dalam parlemen

Ket: data dari berbagai sumber.

Budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun dari langit. Ia dibentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Koentjaraningrat mengatakan nilai budaya adalah faktor mental yang menentukan perbuatan seseorang atau masyarakat. Dalam budaya kita, seperti juga di banyak negara dunia ketiga lain, budaya patriarkhi masih sangat kental. Dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam budaya, keadaan ketimpangan, asimetris dan subordinatif terhadap perempuan tampak sangat jelas. Dalam kondisi yang seperti itu proses marginalisasi terhadap perempuan terjadi pada gilirannya perempuan kehilangan otonomi atas dirinya. Eksploitasi serta

Dalam situasi demikian, maka perbedaan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender tumbuh dengan subur.²²

Sebagaimana kita ketahui bersama di dunia Barat maupun Timur, perkembangan peradaban manusia tumbuh dalam lingkup budaya dan ideologi patriarkhi. Di negara-negara barat, Amerika Serikat, dan Eropa Barat, budaya tersebut terlebih dahulu terkikis sejalan dengan perkembangan teknologi, demokrasi dan lain-lain yang mendudukan persamaan dan keadilan sebagai nilai yang sentral. Di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, budaya dan ideologi tersebut masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta menciptakan ketimpangan-ketimpangan gender.

Budaya Patriarkhi adalah tatanan nilai yang dianut dan dipegang teguh masyarakat yang menempatkan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan secara timpang.²³

Bagi masyarakat tradisional, patriarkhi dipandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaan adikodrat yang tidak terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan dalam kehidupan manusia pun diatur berdasarkan perbedaan tersebut. Tambah lagi, faktor agama telah digunakan untuk memperkuat kedudukan kaum laki-laki. Determinisme biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya, karena secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dengan masyarakat pun diciptakan berbeda. Laki-laki selalu dikaitkan

²² Erna Sofyan Syukrie, SH., *Makalah Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Denpasar, 2003.

²³ YJP, *Ibid* hal 30.

Pada umumnya kondisi perempuan di Norwegia tidak jauh berbeda dengan kaum perempuan yang berada di negara lainnya. Masyarakat memandang kaum perempuan sebagai warganegara kelas dua dan negara juga turut melanggengkan praktek ketidakadilan gender dengan melakukan pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak-hak sebagai warganegara.

Perjuangan pergerakan perempuan di Norwegia membuahkan hasil yang sesuai, yaitu dengan presentase perempuan dalam parlemen yang cukup besar, pendidikan yang diperoleh perempuan Norwegia untuk tingkat perguruan tinggi memiliki angka sebesar 60%, pekerja perempuan khususnya sektor pemerintah juga memiliki angka yang besar yaitu 80%. Di Indonesia secara hukum kaum perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama berdasarkan UUD 1945. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih dijumpai kesulitan-kesulitan merealisasikan kesamaan hak tersebut. Pada dasawarsa terakhir ini dalam komunitas dan sektor tertentu perempuan telah mendapatkan tempat yang berarti, tetapi secara makro perempuan masih berhadapan dengan berbagai masalah.

Walaupun Norwegia memiliki jumlah angka yang lebih besar dari Indonesia, pengalaman menunjukkan bahwa posisi perempuan di Indonesia dan Norwegia serta banyak di negara di dunia ini memang masih tidak seberuntung mitranya yaitu kaum laki-laki. Sampai saat ini masalah perempuan masih dilihat sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Jika kebudayaan adalah realitas kehidupan masyarakat, tradisi, pola perilaku keseharian, hukum, pikiran dan keyakinan, maka kebudayaan dalam realitas kehidupan memperlihatkan secara

H. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan bagi penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi literatur, yang diperoleh dengan mencari informasi data dari dinas atau instansi terkait, buku-buku, jurnal, terbitan berkala, sumber-sumber dari internet, dan bahan-bahan kajian tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi

I. Sistematika Penulisan

Penulis menguraikan rangkaian penulisan secara urut mulai dari bab I hingga akhir yaitu:

Bab I memaparkan tentang Alasan Pemilihan Judul "*Keterwakilan Politik Perempuan dalam Parlemen di Norwegia dan Indonesia*" yang berisi tentang bagaimana keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam parlemen di kedua negara tersebut. Tujuan Penelitian, yang menggambarkan fenomena politik perempuan dari sejarah gerakan perempuan yang terjadi di Norwegia dan Indonesia. Latar Belakang Masalah, berangkat dari prinsip dasar yang diamanatkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW) dan kedua negara telah meratifikasi dasar-dasar yang terdapat dalam UU CEDAW dengan memberikan kesempatan terhadap perempuan untuk dapat turut serta menentukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan berpartisipasi langsung dalam parlemen. Yang mana kenyataannya dalam keterwakilan perempuan di parlemen tersebut,

ditemukannya tindak diskriminasi terhadap keterwakilan perempuan dalam parlemen di Norwegia dan Indonesia. Selanjutnya ada Pokok Permasalahan yang berisi tentang masalah yang paling mempengaruhi tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen di Norwegia dan Indonesia. Kerangka Dasar Teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan Teori Sistem Politik (struktur politik), adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Serta Konsep Budaya Politik, yang sangat menentukan kedudukan atau posisi perempuan di dalam masyarakat. Dalam budaya politik setiap negara terdapat di dalamnya budaya patriarkhi yang secara tidak langsung telah menempatkan perempuan pada posisi kelas dua dalam masyarakat. Termasuk untuk mengetahui keterwakilan politik warga negara di suatu negara, maka perlu terlebih dahulu diketahui bagaimana kebudayaan di negara tersebut dapat memberi pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. Hipotesis yang terdiri dari dua pokok permasalahan yang ditemukan dan mendasari keterwakilan perempuan dalam parlemen. Jangkauan Penelitian, untuk memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang menjadi pokok penelitian, yaitu dari tahun 1976 yang merupakan tahun perempuan internasional sampai dengan 2004. Metode Pengumpulan Data yang menggunakan *Library Research* serta sumber-sumber lain yang mendukung atas penulisan skripsi. Terakhir adalah Sistematika

Bab II membahas bagaimana keterwakilan perempuan dalam parlemen di Norwegia. Dari sejarah pergerakan perempuan yang bertujuan untuk mendapatkan hak sebagai warganegara dalam bidang politik. Populasi dan kondisi umum perempuan di Norwegia. Sistem pemilihan yang ada di Norwegia yang menggunakan sistem pemilihan Proporsional tertutup untuk pemilihan nasional. Proses rekrutmen partai politik, secara historis partai-partai kiri di Norwegia memiliki hubungan yang khusus dengan gerakan perempuan. Kuota perempuan dalam partai politik Norwegia, pemberlakuan *affirmative action* bagi perempuan sangat membantu bagi peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Bab III, menggambarkan tentang keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia. Sejarah pergerakan perempuan Indonesia yang berawal dari terselenggaranya Kongres Perempuan I di Yogyakarta tahun 1928. yang menjadi momentum pergerakan perempuan di Indonesia. Sistem pemilihan yang menggunakan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD. Proses rekrutmen parpol yang cenderung menyulitkan kandidat perempuan. Kemudian kuota perempuan Indonesia yang baru saja dilegalisasikan oleh pemerintah dengan ditetapkannya UU Nomor 12/2003 pasal 65 ayat 1 tentang 30 persen keberadaan perempuan dalam parlemen. Sangat membantu perempuan untuk dapat terlibat secara langsung dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perempuan dalam parlemen Indonesia yang selama ini keberadaan mereka diidentikan dengan

perempuan dalam parlemen masih diragukan dan menciptakan kelompok elite tertentu dan melupakan kostituennya. Seterusnya ada budaya patriarkhi yang mengakar dalam masyarakat menjadi hambatan terhadap keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia.

Bab IV, merupakan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen di Norwegia dan Indonesia. Hal yang mempengaruhi mengapa tingkat keterwakilan perempuan di Indonesia jauh tertinggal di bawah Norwegia. Pengaruh sistem pemilihan Proporsional tertutup yang digunakan Norwegia dan Proporsional terbuka oleh Indonesia memberikan poin atas Norwegia karena pemilih hanya memilih partai, sedang caleg ditentukan oleh parpol. Sedang pemilih di Indonesia memilih parpol dan caleg, yang menyebabkan pemilih tidak mesti memilih caleg perempuan. Proses rekrutmen juga merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah perempuan untuk menjadi caleg di Indonesia. Serta pengaruh budaya patriarkhi dan kondisi sosial budaya perempuan yang cenderung mengakar dalam masyarakat Indonesia membatasi ruang gerak perempuan di Indonesia yang masyarakatnya masih sangat ketimuran.

Bab V adalah kesimpulan dari semua penjelasan bab-bab sebelumnya, bagaimana masyarakat politik di Norwegia telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam dunia politik tersebut sebagai wakil perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan negaranya. Indonesia masih terus berjuang menegakkan kesetaraan hak-hak perempuan khususnya dalam bidang politik, hal-hal yang membedakan

tingkat keterwakilan tersebut hendaknya dicermati dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati oleh kalangan akademisi politik kita. Sehingga Indonesia tidak tertinggal terlalu jauh dengan Norwegia dan negara lain di dunia dalam keterwakilan politik perempuan